



► PERATURAN DAERAH

Revisi Perda Sampah Ditarget Rampung Mei

BANTUL—DPRD Bantul optimistis Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) baru pengganti Perda No.2/2019 tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga akan selesai dan diketok pada pertengahan bulan depan.

Pasalnya, saat ini naskah akademik yang selama ini menjadi kendala telah 50% rampung. "Jadi, saat ini naskah akademiknya juga masih terus berproses. Kemungkinan raperda ini baru bisa diketok pada pertengahan Mei 2025. Mungkin berbarengan dengan Raperda Mihol [minuman beralkohol]," kata Ketua Pansus Raperda Sampah DPRD Bantul, Datin Wisnu Pranyoto, Kamis (24/4).

Menurut politisi Gerindra ini, secara garis besar Raperda Sampah tidak jauh berbeda dengan perda sebelumnya, yakni Perda No.2/2019. Hanya saja, pada raperda yang baru kali ini lebih menekankan kepada upaya mengatasi masalah sampah dengan titik tekan selesai di tempat. "Jadi selesai di tempatnya itu di rumah tangga sendiri. Sampah harus sudah dipilah di tingkat rumah tangga. Beda dengan perda sebelumnya," ucap Datin.

Oleh karena itu, dalam raperda terbaru tersebut ada kewajiban bagi masyarakat untuk menyelesaikan sampah dari tingkat rumah tangga. Pasalnya selama ini, penghasil sampah terbesar adalah rumah tangga. "Sehingga di rumah tangga diharapkan sudah selesai, sudah dipilah," ucap Datin.

Di sisi lain, dalam raperda tersebut, kata Datin, juga diatur terkait besaran *tipping fee* sampah (bea gerbang yang dikeluarkan pemerintah ke pihak pengolah sampah). Hal itu lantaran aturan besaran *tipping fee* yang ada di Perda No.2/2019 perlu disesuaikan dengan kondisi di lapangan.

Menurut Datin, sebelum menyempurnakan naskah akademik Raperda Sampah yang baru, pansus juga telah meminta Dinas Lingkungan Hidup (DLH) menginventarisasi apa saja yang dibutuhkan dan diatur dalam raperda sampah yang baru. "Dengan begitu semua hal berkaitan dengan sampah, baik sampah rumah tangga maupun pengelolaan dan pengolahan sampah masuk dalam draf raperda sampah terbaru."

Kepala Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Bantul, Bambang Purwadi Nugroho mengungkapkan dasar perubahan Perda No.2/2019 adalah mengikuti perkembangan dan penanganan sampah di Bantul.

Bambang juga mengakui pada draf raperda sampah terbaru, khususnya yang menyangkut pengelolaan sampah rumah tangga dan sampah sejenis rumah tangga.

Selain itu, ada pengaturan terkait pengangkutan sampah seiring dengan penutupan TPA Piyungan. Di sana juga diatur terkait dengan kompensasi dan *tipping fee*. "Ada juga regulasinya disana," ucapnya. (Jumali)